

PENDIDIKAN DAN PEMAJUAN PEREMPUAN : MENUJU KEADILAN GENDER

Oleh :

Ariefa Efianingrum

Dosen FSP- FIP UNY

Abstrak

Pendidikan yang tidak diskriminatif dan berkeadilan disadari sangat bermanfaat dalam upaya mewujudkan kesetaraan dalam relasi interaksi antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam kenyataannya, perempuan masih banyak mengalami diskriminasi, khususnya dalam bidang pendidikan. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidakadilan tersebut, yaitu faktor struktural dan kultural. Selain kebijakan pembangunan yang kurang sensitif gender, di masyarakat juga masih terdapat praktik-praktik budaya yang bias gender. Menghadapi kondisi semacam itu, tentunya diperlukan upaya nyata dalam upaya pemajuan perempuan menuju pendidikan yang lebih berkeadilan gender. Terbukanya akses pendidikan yang lebih luas adalah satu kunci untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan agar dapat berpartisipasi di segala bidang kehidupan di masyarakat.

Kata kunci: pendidikan perempuan, keadilan gender

A. Pendahuluan

Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya dilahirkan sama. Oleh karena itu, sudah seharusnya mereka memiliki akses yang sama pula dalam segala hal, di antaranya : pendidikan, pengambilan keputusan, kesehatan, dan pelayanan penting lainnya. Pendidikan merupakan hak asasi manusia. Namun, saat ini masih banyak pihak yang belum menganggap bahwa memperoleh pendidikan merupakan suatu hak asasi, khususnya bagi perempuan. Sering sekali anak perempuan menjadi pihak yang dilanggar hak asasinya. Padahal pendidikan adalah jalan menuju pembebasan dari kemiskinan. Dengan tetap masih adanya perbedaan dan pembedaan perlakuan pada perempuan, maka perempuan akan sulit untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. ADB (*Asian Development Bank*) melaporkan bahwa dua pertiga dari penduduk miskin di Asia Pasifik, mayoritasnya adalah kaum perempuan. Tanpa akses yang besar pada

pendidikan, para perempuan, khususnya perempuan miskin, semakin sedikit peluang perempuan untuk meningkatkan partisipasinya dalam masyarakat.

Pendidikan merupakan sarana yang penting untuk mendorong pembangunan dan mencapai kesetaraan serta keadilan. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan bermanfaat, tidak hanya bagi perempuan namun juga untuk laki-laki, terutama dalam menyetarakan hubungan di antara keduanya. Pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi perempuan dapat memberikan kekuatan bagi mereka dalam mencapai tujuan mengurangi kemiskinan. Untuk dapat menjadi agen perubahan, perempuan harus memiliki akses yang adil terhadap kesempatan pendidikan. Melek huruf bagi perempuan merupakan kunci untuk meningkatkan kesehatan, gizi, dan pendidikan, dan untuk memberdayakan perempuan agar bisa berpartisipasi penuh dalam pembuatan keputusan dalam masyarakat. Pendidikan juga merupakan kunci untuk meningkatkan status perempuan.

Pembangunan sumber daya manusia yang setara dan berkeadilan gender masih jauh panggang dari api. Meskipun pemerintah telah memiliki kebijakan untuk memberantas buta huruf, tetap saja banyak anak-anak, remaja, dan dewasa yang tidak berpendidikan. Di Negara-negara Asia Selatan, diperkirakan hanya 94 anak perempuan bersekolah dasar dibandingkan 100 anak laki-laki. Di dunia, di antara 100 anak yang terpaksa keluar dari sekolah dasar, 85 % nya adalah perempuan (Jurnal Perempuan No. 50, 2006:10).

Berikut beberapa gambaran tentang ketertinggalan perempuan terhadap laki-laki :

1. Tingkat pendidikan perempuan dibandingkan laki-laki masih rendah. Data Susenas Tahun 2003 menunjukkan bahwa penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum sekolah jumlahnya 2 kali lipat penduduk laki-laki (11,56 % berbanding 5,43 %). Penduduk perempuan yang buta aksara sekitar 5,48 %. Rata-rata lamanya sekolah pada perempuan adalah 6,5 tahun, sedangkan laki-laki adalah 7,6 tahun.

2. Angka kematian ibu hamil/melahirkan (AKI) masih tinggi, yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup. Prevalensi anemia pada ibu hamil masih lebih dari 50 %.
3. Keterwakilan perempuan di DPR masih rendah. Hanya 11,6 % dan di DPD hanya 19,8 %.
4. Partisipasi perempuan dalam jabatan publik juga masih rendah. Dapat dilihat dari rendahnya persentase perempuan PNS yang menjabat sebagai eselon I, II, dan III yang hanya 12 %.
5. Masih banyak peraturan/perundangan serta pelaksanaannya yang bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan.
6. Masih kuatnya budaya patriarki sebagian besar masyarakat, sehingga masyarakat belum berpartisipasi secara maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan.
7. Tingkat kemiskinan penduduk yang tinggi, sebagian besar adalah perempuan, termasuk perempuan kepala keluarga, janda, dan lanjut usia.

Meskipun dalam proses pembangunan perempuan dapat berpartisipasi secara aktif, tetapi dalam prakteknya banyak sekali hambatan yang dijumpai. Walaupun kita telah memiliki berbagai instrumen hukum dan kebijakan pemajuan perempuan yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki, serta sudah adanya perbaikan kondisi dan situasi perempuan, namun dalam kenyataan menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari diskriminasi yang luas dan kekerasan terhadap perempuan di semua bidang, termasuk pendidikan, masih sering terjadi. Kiranya, tanpa adanya *political will* dan *action* tertentu, angka melek huruf dan ketrampilan hidup (*lifeskill*) akan tetap rendah. Hal tersebut tentunya memiliki sumbangan yang cukup signifikan untuk melahirkan ketidakberdayaan dan kemiskinan di kalangan perempuan.

B. Pembahasan

1. Ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan

Gender in common usage refers to the distinctions between masculinity and femininity. Gender is a social construction, that it is

performative and that one is always in the process of becoming gender rather than actually being a gender (<http://www.wikipedia>). Secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian; kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tetapi jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminin adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita. Setiap masyarakat memiliki berbagai naskah (*scripts*) untuk diikuti oleh anggotanya seperti mereka belajar memainkan peran feminin atau maskulin, sebagaimana halnya setiap masyarakat memiliki bahasanya sendiri (Mosse, 2007:2-3). Sejak kita sebagai bayi mungil hingga mencapai usia tua, kita mempelajari dan mempraktikkan cara-cara khusus yang telah ditentukan oleh masyarakat bagi kita untuk menjadi laki-laki dan perempuan. Gender adalah seperangkat peran yang menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin.

Sementara itu, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri, gender merupakan konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada keterkaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur keadilan masyarakat secara lebih luas (Fakih, 2005:3-4). Dengan demikian, pemahaman dan pembedaan yang jelas antara konsep seks dan gender sangat diperlukan dalam membahas masalah ketidakadilan sosial. Sesungguhnya terjadi keterkaitan antara persoalan gender dengan persoalan ketidakadilan sosial lainnya.

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dalam bentuk praktik pembedaan perlakuan. Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana kaum laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan (Fakih, 2006:12), seperti : marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotype atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Disadari, masih banyak dijumpai ketimpangan-ketimpangan gender dan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat kita. Bias gender yang dialami perempuan tidak sebatas kekerasan, tetapi juga dalam bentuk marginalisasi atau proses pemiskinan perempuan dalam ekonomi, subordinasi dalam keputusan politik, dan ketimpangan dalam pendidikan (Kosasih dalam Pikiran Rakyat, 2004). Banyak fakta yang membuktikan bahwa kesenjangan gender dalam bidang pendidikan hingga kini terus terjadi. Fakta-fakta itu menunjukkan angka partisipasi perempuan hampir di semua jenjang dan program pendidikan masih tertinggal. Gejala kesenjangan gender juga muncul pada perlakuan dalam proses pembelajarannya itu sendiri yang kurang sensitif gender. Dalam berbagai kesempatan, siswa laki-laki ditempatkan dalam posisi yang lebih menentukan.

Pendidikan kita masih juga dilingkupi bias gender. Bahkan *stereotype* gender juga masih kental di sekolah, yaitu bahwa terdapat pembedaan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan dalam sistem pendidikan. Seperti temuan penelitian yang dilakukan oleh Marie Astuti (Jurnal Perempuan No.44, 2005:22), bahwa buku-buku sekolah untuk anak Sekolah Dasar di Yogyakarta sarat dengan nuansa pembedaan gender tersebut.

Selain itu, bias gender juga merambah dalam wilayah hubungan antara pendidik dengan terdidik, serta perlakuan sekolah terhadap anak didik. Materi-materi yang terdapat dalam mata pelajaran tampaknya disiapkan untuk pembagian peran gender untuk tujuan status sosial.

Kiranya perlu melakukan banyak perubahan, terkait dengan gambar-gambar yang memperkuat *stereotype* gender dalam kurikulum, buku-buku teks, dan media pendidikan lainnya. Menghilangkan pandangan negatif terhadap perempuan dalam buku-buku teks perlu dilakukan. Buku-buku teks dapat direvisi sedemikian rupa, supaya perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang setara. Kesetaraan gender menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang sama. Kesetaraan gender berarti tidak mengakui dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam hal apapun. Kesetaraan gender berarti memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan seperti halnya pada laki-laki.

Bentuk-bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi gender (<http://www.duniaesai.com/gender/gender2.htm>) :

1. Marginalisasi perempuan sebagai salah satu bentuk ketidakadilan gender
Proses marginalisasi (peminggiran/pemiskinan) yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di negara berkembang. Pemiskinan atas perempuan maupun laki-laki yang disebabkan karena jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender.
2. Subordinasi
Subordinasi adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak lama terdapat pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Kenyataan memperlihatkan bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang geraknya, terutama dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan sebagai subordinasi dari kaum laki-laki.

3. *Pandangan stereotype*

Stereotype adalah citra tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu *stereotype* yang berkembang berdasarkan pengertian gender terjadi terhadap perempuan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Hal ini tidak hanya terjadi dalam lingkup rumah tangga, tetapi juga terjadi di tempat kerja dan masyarakat, bahkan di tingkat pemerintah dan negara.

4. Kekerasan

Berbagai bentuk tidak kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan, muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan merupakan terjemahan dari *violence*, artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja, tetapi juga yang bersifat non fisik.

5. Beban Ganda

Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan laki-laki, dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Berbagai observasi menunjukkan bahwa perempuan mengerjakan hampir 90 % dari pekerjaan rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

2. Praktik budaya yang menghambat kesetaraan gender

Ketimpangan gender yang terjadi diakibatkan karena masih kentalnya pandangan dalam masyarakat kita, bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang berbeda. Memiliki anak laki-laki dianggap lebih penting dan bernilai daripada anak perempuan. Anak laki-laki kelak diharapkan menjadi pemimpin bagi keluarga, tidak saja dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam semua lini (Jurnal Perempuan No. 44, Tahun

2005:23). Akibatnya prioritas dana keluarga akan selalu untuk pendidikan anak laki-laki daripada anak perempuan. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan anak laki-laki, maka akan semakin tinggi pula nilai dan kedudukannya dalam masyarakat.

Dalam ranah kebudayaan, perempuan telah dipersepsi sebagai manusia domestik, yang ruang geraknya sangat terbatas. Tidak heran jika insiden kemiskinan dan buta huruf lebih banyak menimpa perempuan. Salah satu pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan –baik kerja produktif, reproduktif, privat, dan publik- dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga, mulai dikenal sebagai pemberdayaan atau secara umum pendekatan gender and development (GAD) yang berkembang dari kritik terhadap perempuan dalam pembangunan/*woman in development* (WID). Pemberdayaan lebih terkait dengan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up*) daripada pendekatan dari atas ke bawah (*top down*). Pendekatan ini melacak akar-akar subordinasi dalam ras, kelas, dan posisi (Mosse, 2007:210). Pendekatan ini memahami tujuan pembangunan bagi perempuan dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal.

Pada fase selanjutnya, muncul pendekatan *gender mainstreaming*/ pengarusutamaan gender (PUG). Pendekatan ini mementingkan transformasi agenda pembangunan : paradigma pembangunan dan prioritasnya dipikirkan ulang, agenda sektoral dirubah, mekanisme akuntabilitas dan partisipasi ditingkatkan, melalui pemakaian analisis gender yang mampu memberikan data tentang ketidaksetaraan atau kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks setempat (Jurnal Perempuan No. 50, 2006:11). Dengan demikian, prioritas pembangunan secara otomatis akan muncul dan dikonsentrasikan pada sebab-sebab peminggiran perempuan dan komitmen untuk mengubah relasi sosial yang ada.

Fakta-fakta yang menunjukkan kesenjangan gender berkaitan dengan banyak faktor, antara lain : perilaku masyarakat yang lebih mementingkan

pendidikan anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Faktor budaya juga berpengaruh, terutama pada pemilihan jurusan oleh para peserta didik itu sendiri. Bila laki-laki lebih banyak memilih bidang ilmu keras (*hard sciences*) yang menyiapkan mereka menjadi tenaga produksi utama, maka perempuan lebih banyak memilih bidang-bidang ilmu perilaku, seperti pendidikan, psikologi, dan kesejahteraan sosial. Faktor lain yang juga memiliki pengaruh besar adalah mentalitas para pengelola dan pelaksana pendidikan yang masih berwarna laki-laki. Kultur birokrasi masih menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan, khususnya dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan (Kosasih dalam Pikiran Rakyat, 2004).

Dalam setiap masyarakat, kaum laki-laki dan perempuan memiliki peran gender yang berbeda. Terdapat perbedaan pekerjaan yang mereka lakukan dalam komunitasnya, dan status maupun kekuasaan mereka di dalam masyarakat boleh jadi berbeda pula. Perbedaan jalan perkembangan peran gender dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai macam faktor, mulai dari lingkungan alam, hingga cerita dan mitos-mitos yang digunakan untuk memecahkan teka-teki perbedaan jenis kelamin, mengapa perbedaan itu tercipta dan bagaimana dua orang yang berlainan jenis kelamin dapat berhubungan baik satu dengan yang lainnya dan dengan sumber daya alam di sekitarnya (Mosse, 2007:5).

Terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial maupun kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan –seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Namun dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat biasanya melakat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat-sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, dan sama sekali bukan kodrat (Fakih, 2006:9).

Gender dan peran gender cenderung kurang menawarkan prestasi di semua lingkup kehidupan, kurangnya kesempatan terhadap kepemilikan kekayaan serta asset-aset lainnya, terhadap kekuasaan politik, pendidikan, kesehatan yang baik, dan penghidupan yang layak. Peran gender dikonstruksi dari tumpukan batu bata bangunan biologis dasar di mana kita semua dilahirkan, tetapi kelas, suku, warna kulit, agama, kasta, dan kebangsaan memiliki peranan vital dalam memutuskan secara tepat tentang kesempatan hidup, apa yang dimiliki perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki dengan latar belakang yang sama (Mosse, 2007:269-270).

Persoalan budaya yang menghambat aktivitas pendidikan dan prestasi anak-anak perempuan maupun laki-laki harus dikaji secara mendalam. Praktek-praktek budaya seperti pemisahan dan pembedaan jenis kelamin seringkali menghalangi partisipasi anak-anak perempuan untuk bersekolah. Dalam banyak masyarakat, orang tua beranggapan bahwa menyekolahkan anak perempuan kurang menguntungkan dibandingkan menyekolahkan anak laki-laki. Bagaimana menghadapi norma budaya yang membuat perempuan tetap tertinggal ?. Bagaimana cara mendorong orang tua untuk menyekolahkan anak-anak perempuan mereka ?. Sejumlah pertanyaan tersebut kiranya memerlukan perenungan. Kesetaraan gender menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang sama. Kesetaraan gender berarti tidak mengakui dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam hal apapun. Kesetaraan gender berarti memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan seperti halnya pada laki-laki.

3. Mengupayakan kesetaraan gender

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan structural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender, berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. (<http://www.duniaesai.com/gender/gender2.htm>).

Pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dalam pembangunan nasional, termasuk bidang pendidikan.

Kesetaraan gender seharusnya mulai ditanamkan pada anak sejak dari lingkungan keluarga. Memang tidak mudah bagi orang tua untuk melakukan pemberdayaan yang setara terhadap anak perempuan dan lakinya. Karena, di satu pihak mereka dituntut oleh masyarakat untuk membesarkan anak-anaknya sesuai dengan aturan anak perempuan dan aturan anak laki-laki. Di lain pihak, mereka mulai menyadari bahwa aturan-aturan itu melahirkan ketidakadilan bagi anak perempuan maupun laki-laki. Namun, ayah dan ibu yang saling melayani dan saling menghormati akan menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Orang tua yang berwawasan gender diperlukan bagi pembentukan mentalitas anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam konteks sekolah, bagaimana meningkatkan kepekaan guru mengenai pentingnya pendidikan bagi perempuan?. Kurikulum diperbaharui dan ditinjau ulang untuk menghilangkan pandangan negatif tentang perempuan. Perlu juga meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan bagi anak-anak perempuan, mengintegrasikan gender sebagai mata ajaran khusus dalam pelatihan untuk guru-guru di sekolah, memasukkan kesadaran akan kesetaraan gender dalam pendidikan melalui sekolah, dan mendorong masyarakat mengirim anak-anak perempuan mereka ke sekolah secara teratur, untuk memberi rasa aman. Dengan demikian, hambatan-hambatan tradisional lambat laun akan hilang.

Para guru merupakan model peran yang penting. Namun, pendidikan yang memperhatikan kesetaraan gender di sekolah-sekolah masih jauh dari yang diidealkan. Para guru sebagai pendidik di sekolah kurang mempunyai pengalaman dalam menanamkan nilai-nilai baru dalam hubungan heteroseksual dalam pengasuhan anak di sekolah. Mereka masih memiliki pola berpikir bahwa laki-laki akan menjadi pemimpin, sedangkan anak perempuan akan menjadi ibu rumah tangga. Pemahaman kesetaraan gender, kesadaran, dan sensitivitas gender oleh para penyelenggara pendidikan, kiranya perlu terus menerus diasah demi perubahan paradigma dan persepsi yang lebih adil gender (<http://duniaesai.com/gender/gender8.htm>).

Bagaimana meningkatkan komitmen terhadap perjuangan keadilan gender, bukan hanya bagi kaum perempuan, tetapi bisa juga dari kaum pria yang memiliki kepedulian terhadap program gender. Ketimpangan gender yang selama ini terjadi, perlu segera diatasi, antara lain melalui pelibatan langsung semenjak perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran dan impementasinya, monitoring seta evaluasinya dengan mempertimbangkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan dalam hal partisipasi dan akses pada pendidikan.

Untuk menjamin pemenuhan HAM dan implementasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*), perlu dilakukan upaya dan tindakan sebagai berikut:

- a. Secara terencana dan konsisten melakukan PUG dalam seluruh kebijakan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan beperspektif gender.
- b. Melaksanakan *affirmative action* untuk situasi tertentu (contoh keterwakilan perempuan di bidang politik minimal 30 %).
- c. Menjamin perlindungan terhadap perempuan dan kelompok minoritas dari segala bentuk ancaman dan subordinasi gender berdasarkan ras, agama, etnik, kelas, usia, *diffability*, pilihan politik.
- d. Membuat kebijakan yang sensitive gender dan mengamandemen kebijakan yang merugikan perempuan.

- e. Membangun system penanggulangan bencana alam dan konflik social, termasuk pemulihan yang sensitive terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan.
- f. Mendindak tegas lembaga-lembaga yang mengatasnamakan agama dalam melakukan tindakan-tindakan yang menghancurkan gerakan perempuan.
- g. Mengalokasikan anggaran yang sensitive gender dan berpihak pada rakyat demi peningkatan kesejahteraan.
- h. Menjamin perempuan mendapat kesempatan memperoleh pendidikan gratis dan berkualitas, dan pelayanan kesehatan yang sensitif gender, termasuk pelayanan untuk kesehatan reproduksi.
- i. Segera menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia/perempuan di masa lalu.
- j. Segera menghapus atau merevisi perda-perda atau kebijakan yang inkonstitusional atau diskriminatif.
- k. Di bidang politik, Negara harus menjamin pemenuhan hak politik perempuan.

Dalam tingkat perkembangan masyarakat modern dewasa ini, di mana bangunan sosial ekonomi ditopang oleh ilmu pengetahuan serta teknologi, penyelenggaraan bidang pendidikan sangat diharapkan kemajuannya (Jurnal Perempuan No. 44, Tahun 2005:23). Kemajuan pendidikan yang sangat pesat menjadikan bangsa yang terdidik dan berkualitas lebih percaya diri dalam menghadapi kehidupan yang semakin kompetitif dan bersifat global. Di pundak pendidikanlah kunci masa depan suatu bangsa diletakkan. Dengan demikian, sudah seharusnya secara konseptual pendidikan terbuka bagi transformasi nilai-nilai baru yang membebaskan, bukannya membelenggu. Dalam konteks Indonesia dan persoalan anak perempuan dan masa depannya, di mana kondisi pendidikan carut marut dan ketidakadilan sosial menyebar di setiap sektor kehidupan, sudah saatnya kita berpikir tentang membangun kembali pendidikan sebagai bagian dari gerakan kultural (*cultural force*).

Perlu ditumbuhkan kesadaran dan keadilan gender di masyarakat. Pengembangan program peningkatan peran dan kedudukan perempuan perlu strategi, yaitu mengembangkan model pendidikan yang berperspektif gender (Sastriyani dalam Sumijati, 2001:143). Pendidikan tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat, baik orang dewasa maupun anak-anak. Orang tua diharapkan dapat mendidik anak-anak perempuan dan laki-laki tanpa membedakan jenis kelaminnya. Pendidik di sekolah perlu mendidik anak didiknya untuk tidak hanya menekuni bidang studi "*female field*", tetapi juga diarahkan kepada pemilihan bidang yang dianggap bidangnya pria, misalnya eksakta atau teknik. Hal ini karena dalam pembangunan menuju industrialisasi, peran ilmu pengetahuan dan teknologi eksakta juga perlu dikuasai oleh perempuan.

Pendidikan yang berperspektif gender adalah pendidikan yang menggunakan konsep keadilan gender, kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dan perempuan, memperhatikan kebutuhan serta kepentingan gender praktis-strategis perempuan dan laki-laki, dan pemberian wawasan kepada masyarakat yang masih memiliki pandangan konvensional terhadap laki-laki dan perempuan. Perlu diingat, bahwa secara konstitusional tidak ada perbedaan perlakuan laki-laki dan perempuan di Indonesia. Sosialisasi pendidikan yang berperspektif gender dapat dilakukan di berbagai saluran pendidikan, seperti melalui ceramah, sosialisasi dalam keluarga, media massa (media cetak maupun media elektronik), pelatihan, panduan, dan juga revisi buku-buku pelajaran yang masih bias gender di sekolah.

C. Penutup

Masa depan suatu bangsa sangat tergantung pada pendidikan. Pendidikan juga merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai kesetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Masih banyak dijumpai kebijakan-kebijakan pembangunan yang bias gender dan terkesan mengabaikan peran perempuan. Dalam masyarakat juga masih terdapat nilai-nilai dan praktik budaya yang menghambat keadilan serta kesetaraan

gender. Menghadapi situasi seperti itu, sudah seharusnya disadari bahwa secara konseptual pendidikan terbuka bagi transformasi nilai-nilai baru yang membebaskan dan berkeadilan, bukan sebaliknya.

Tantangan ke depan adalah membangun kembali pendidikan sebagai bagian dari gerakan kultural (*cultural force*). Untuk menjamin pemenuhan HAM dan implementasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), perlu dilakukan *political will* dan *action* nyata agar di masa mendatang, perempuan dapat maju bersama dan merasakan perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya (laki-laki), karena sesungguhnya perempuan juga manusia yang memiliki Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakih, Mansoer. 2006. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Jurnal Perempuan, No. 44 Tahun 2005. Pendidikan Alternatif untuk Perempuan.
- Jurnal Perempuan, No. 45 Tahun 2006. Sejauh Manakah Komitmen Negara terhadap : Diskriminasi terhadap Perempuan.
- Jurnal Perempuan, No. 50 Tahun 2006. Pengarusutamaan Gender.
- Mosse, Julia Cleves. 2007. *Gender and Development*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nuryatno, Agus. 2007. *Refleksi Pendidikan Bersama Paulo Freire*. (<http://www.duniaesai.com/pendidikan/pend41.htm>)
- Sindhunata. 2000. *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan : Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Yogyakarta : Kanisius.
- Sumijati, As. *Manusia dan Dinamika Budaya, dari Kekerasan sampai Baratayuda*. Yogyakarta : BPPF Fakultas Sastra UGM.

Tilaar, H.A.R. 1999. ***Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia : Strategi Reformasi Pendidikan.*** Bandung : Remaja Rosdakarya.

Wahono, Francis. 2000. Kapitalisme Pendidikan. Yogyakarta : Kanisius.

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/13/humaniora/2359694.htm>

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0503/03/1103.htm>

http://www.unicef.org/indonesia/id/education_3131.html